

Nomor : 027 /PM.00.02/K.SN-13/02/2024

6 Februari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 3 lembar

Hal : **Imbauan Penertiban Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pada Masa Tenang**

Yth.

1. **Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**
2. **Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**
- ③ **Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan**

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 478 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
8. Surat Edaran Nomor 5 tahun 2024 Tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a) *Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat*

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.

- b) *Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.*
- c) ***Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024***

2. Peraturan mengenai Masa Tenang

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Pasal 1 angka (36), berbunyi:

(36) Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas Kampanye Pemilu

Pasal 278 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi:

- (1) *Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*
- (2) *Selama Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:*
 - a. *tidak menggunakan hak pilihnya;*
 - b. *memilih pasangan Calon;*
 - c. *memilih Partai politik Peserta Pemilu tertentu;*
 - d. *memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau*
 - e. *memilih calon anggota DPD tertentu*

- b. Pasal 1 angka (29) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

29. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (29), yang berbunyi:

27. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

Pasal 27 Ayat (3) dan Ayat (4), yang berbunyi:

- (3) *Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
- (4) *Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun*

3. Peraturan mengenai citra diri, Alat Peraga Kampanye

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (32), yang berbunyi:

32. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Pasal 34 ayat (2), yang berbunyi:

- (2) *Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. reklame;*
 - b. spanduk; dan/atau*
 - c. umbul-umbul.*

4. Peraturan mengenai pengawasan terhadap Masa Tenang pada Pemilu Tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 42, yang berbunyi:

- (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang.*
- (2) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:*
 - 1. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;*
 - 2. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;*
 - 3. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - 4. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui patroli pengawasan Masa Tenang

5. Peraturan mengenai sanksi dan ketentuan Pidana Pemilu pada tahapan Kampanye

Pasal 492, berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 509, berbunyi:

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2), berbunyi:

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

6. Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu.

Nomor 7, 9, dan 10 Surat Edaran Bawaslu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagai berikut :

7. Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 6 dengan bersurat kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Terlapor untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud angka 6 huruf b paling lambat 3 (tiga) hari kalender atau dengan segera sejak surat Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan;
 9. Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud angka 7 huruf b, Terlapor tidak menurunkan/mencabut/mencopot APK, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Resor untuk melakukan penertiban.
 10. Dalam hal Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan penertiban sebagaimana dimaksud angka 9, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penertiban terhadap APK yang dikualifikasi sebagai pelanggaran administratif Pemilu dengan cara:
 - a. mendokumentasikan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penertiban;
 - b. memastikan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dirusak, dihancurkan, dihilangkan, membuat tidak dapat dipakai, serta menyimpannya di tempat yang layak;
 - c. melakukan koordinasi dengan Peserta Pemilu agar mengambil APK miliknya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau untuk:
1. Memastikan pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang.
 2. Memastikan pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu Tahun 2024 menurunkan semua alat peraga Kampanye Pemilu dan/atau Bahan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Tidak melakukan aktivitas politik praktis dan/atau kegiatan yang mengarah kepada Kampanye di masa tenang

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n KETUA
Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa**

YULIANTO ARDIWINATA, S.Sos., M.Si.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Yth. Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Lampiran Surat

Nomor : 027 /PM.00.02/SN-13/02/2024

Tanggal : 6 Februari 2024

Ketua Partai Politik :

1. DPC Partai Kebangkitan Bangsa
2. DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. DPC Partai PDI Perjuangan
4. DPD II Partai Golkar
5. DPD Partai NasDem
6. DPD Partai Buruh
7. DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. DPD Partai Keadilan Sejahtera
9. DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10. DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
11. DPC Partai Bulan Bintang
12. DPC Partai Demokrat
13. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14. DPD Partai Perindo
15. DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16. DPD Partai Ummat

Lampiran II Surat

Nomor : 027 /PM.00.02/SN-13/02/2024

Tanggal : 6 Februari 2024

TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON:

1. ANIES RASYID BASWEDAN - ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR
2. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA
3. GANJAR PRANOWO – MOHAMMAD MAHFUD MAHMODIN

Lampiran III Surat

Nomor : 027 /PM.00.02/SN-13/02/2024

Tanggal : 6 Februari 2024

Daftar Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan:

1. TAMSIL LINRUNG
2. A. ABD. WARIS HALID
3. H.AL. HIDAYAT SAMSU
4. ST. DIZA RASYD ALI
5. LILY AMELIA SALURAPA, S.E., M.M.
6. IDRUS ANDI PATURUSI
7. Ir. H.A. CHAIRIL ANWAR, M.M
8. ANDI MUH. IHSAN
9. DRS. H. ABD. RAHMAN, M.M
10. A. HATTA MARAKARMA
11. Dr. Apt. H. ANDI MUH YAGKIN PADJALANGI, M.KES.
12. ELLI OSCHAR, M.Pd.I.
13. HARMANSYAH
14. DR. Ir. H. A. M. YUSRAN PARIS, M.M
15. ANDI BASO RYADI MAPPASAILE
16. DATU LUWU ANDO MARADANG MACKULAU, S.H
17. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, SP.
18. Pdt. MUSA SALUSU, M.Th